

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana media baru *indoprogress.com* melakukan konter hegemoni terhadap wacana kelas yang berkuasa di Indonesia. Hal demikian penting dikaji mengingat Indonesia sebagai negara demokrasi memungkinkan adanya ruang bagi media untuk merealisasikan kebebasan berpendapat. Edmund Burke menyebut media adalah satu dari empat pilar demokrasi (Darmanto, 2015). Peranan media hari ini dapat kita lihat tidak sekadar sebagai pembawa berita saja, namun juga sarana interaksi publik dalam membentuk opini publik yang dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan politik. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang berhasil menemukan media berbasis internet atau media *online* atau media daring (dalam jaringan).

Media daring adalah media yang beroperasi berbasis internet dalam suatu situs web (*website*). Contoh dari media daring antara lain *cnn.com*, *bbc.com*, *aljazeera.com*, *kompas.com*, *detik.com*, dan *tempo.co*. Dalam perkembangannya, media daring juga membuat akun media sosial sebagai saluran untuk mendistribusikan konten-kontennya pada khalayak publik. Melalui media sosial itu biasanya muncul percakapan publik yang dipicu oleh konten yang dibagikan oleh media daring. Percakapan publik juga biasanya muncul di kolom opini yang disediakan oleh media daring bagi kolumnis-kolumnis yang hendak menuangkan pemikiran dalam tulisan opininya.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, media dituntut memiliki sikap independen, bebas dari pengaruh atau pilihan pilar kekuasaan lainnya (seperti eksekutif (pemerintah) atau legislatif). Bagi media massa, kemerdekaan adalah ruh keberadaannya. Karya media tidak hanya menampilkan masalah teknis pemberitaan, tetapi juga tentang ideologi yang memberikan informasi untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, media harus menjaga independensi dan netralitas netralitas (Siregar, Rahayu, Rianto, & Adiputra, 2014). Kovach dan Rosentiel menekankan bahwa esensi kemerdekaan media adalah untuk mentransformasikan dari kepatuhan menjadi partai politik menjadi kepentingan publik (Kovach & Rosenstiel, Sembilan Elemen Jurnalisme, 2006; Rice, 1999; Kovach & Rosenstiel, Sembilan Elemen Jurnalisme, 2006; Kovach & Rosenstiel, Sembilan Elemen Jurnalisme, 2006)..

Dalam prakteknya, media ternyata tidak independen dan netral, bahkan bertalian erat dengan kekuasaan. Contohnya media daring di Amerika Serikat, seperti *foxnews.com* secara jelas berpihak pada agenda-agenda Partai Republikan, sementara *cnn.com* tampak terang memihak Partai Demokrat. (Business Insider, 2019) Di Indonesia pun tak jauh beda. Dalam momen pemilihan umum 2014 dan 2019 misalnya, terlihat jelas bagaimana calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi didukung oleh media-media tertentu. Dalam mengangkat suatu isu, media juga tampak tidak netral. Pada isu Omnibus Law RUU Cipta Kerja misal, riset dari *Remotivi* menunjukkan bagaimana media daring cenderung kebanyakan memberitakan hal-hal positif dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dari lima media daring yang diteliti (*kompas.com*, *mediaindonesia.com*, *cnn.com*, *republika.com*, dan *liputan6.com*) terdapat 51,99% konten yang bersifat positif pada

Omnibus Law RUU Cipta Kerja, sementara yang negatif hanya 16,43% dan yang netral 31,58%. Padahal gelombang protes penolakan atas Omnibus Law RUU Cipta Kerja begitu meluas disuarakan oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari serikat buruh, petani, mahasiswa, hingga pegiat lingkungan. *Remotivi* bahkan menyebutkan bahwa dalam isu Omnibus Law RUU Cipta Kerja, peran media telah menjadi humas bagi pemerintah. (Remotivi, 2020)

Media digunakan sebagai corong wacana oleh kekuasaan dapat dijelaskan melalui teori hegemoni yang dicetuskan Antonio Gramsci. Konsepsi Antonio Gramsci tentang hegemoni diartikan bahwa kelas yang berkuasa dalam suatu masyarakat mengoperasikan kekuasaan pada kelas-kelas yang dikuasai dapat melalui metode maupun cara persuasif. Hegemoni adalah sebuah relasi konsensual berupa ketertundukan yang didapatkan dengan cara penguasaan ideologis dari kelas penguasa (Roger, 2004).

Gramsci mengatakan, dalam hal mencapai konsensus untuk mencapai hegemoni, kelas yang berkuasa acapkali menjadikan media sebagai alat penyampaian ideologi. Media adalah “tangan-tangan” milik kelas yang berkuasa untuk memastikan ideologi yang mendominasi yang berujung pada hegemoni terhadap golongan-golongan lainnya di masyarakat (Arief, 2003).

Di satu sisi, hegemoni kelas penguasa terlihat begitu kuat dalam mencengkram kesadaran ideologis masyarakat. Namun di sisi lain, dalam alam pikir Gramsci, masyarakat juga berpeluang untuk melawan hegemoni tersebut. Kelas-kelas sosial yang

subordinat atau kelas yang dikuasai di dalam masyarakat sipil dapat membangun perlawanan dalam bentuk konter hegemoni (*counter hegemony*) (Siswati, 2017).

Terdapat dua fungsi konter hegemoni. Pertama, adalah untuk membongkar ideologi kapitalisme yang ditabur oleh kelas penguasa. Kedua, adalah untuk membangun konstruksi ideologi dan politik yang memungkinkan bagi masyarakat alternatif untuk mengubah tatanan kapitalisme. (Im, 1991)

Manakala kelas penguasa menggunakan media sebagai upaya hegemoni, maka masyarakat yang tertindas pun dapat menggunakan media alternatif sebagai upaya konter hegemoni. Media alternatif sebagai upaya konter hegemoni ini bermaksud untuk mempengaruhi makna suatu informasi di masyarakat agar dapat menandingi hegemoni dari kelas penguasa (Birowo, 2004).

Internet memberikan kemudahan masyarakat dalam berkomunikasi, berinteraksi dan memberikan informasi terkini. Semua orang dan komunitas mempunyai kesempatan yang sama. Meskipun pemerintah memiliki kontrol utama dalam penyebaran dan batasan informasi, tidak menutup kemungkinan terciptanya kanal-kanal penentang wacana pemerintah. Kanal-kanal ini memberikan resistensi wacana bagi masyarakat. Wacana ini bisa saja menjadi sebuah gerakan sosial di dunia nyata. Misalnya gerakan sosial yang dibangun oleh aliansi rakyat bergerak ketika merespon terkait pengesahan RKUHP dan RUU-KPK. Aliansi rakyat bergerak memberikan wacana lain di tengah besarnya wacana “baik” ketika dua rancangan undang-undang itu disahkan (Karta, 2020). Bagi masyarakat

kanal-kanal seperti sangat dibutuhkan, supaya kebenaran tidak menjadi tunggal milik kelas penguasa dan kroco-kroconya, yaitu para *buzzer*.

Tidak semua media di daring menyetujui wacana dari kelas penguasa. Ada beberapa seperti *tirto.id*, *remotivi.com* dan *indoprogress.com*. Ketiga kanal ini dapat menjadi alternatif wacana di tengah tebalnya kabut mainstream informasi. Ini dikarenakan media-media kebanyakan sudah berbentuk korporasi dan syarat menjadi kepentingan pemiliknya. Informasi-informasi yang dikeluarkan memiliki arah kepentingan dalam mengarahkan pengetahuan pembaca. Ada ratusan bahkan jutaan berita misalnya hari ini mengatakan pemerintahan Jokowi sebagai pemerintahan yang baik. Pemberitaan macam ini mengikuti struktur logika janga pendek, utamanya pemberitaan ini berasal dari media-media daring mainstream (Ciptadi & Armando, 2018). Logika ini menyiratkan praktik pelaporan dalam bentuk yang ringkas, berkelanjutan, dan sensasional, serta hanya menekankan sejumlah besar penglik dan pemirsa. Logika ini sering dipakai agar dapat menghasilkan informasi yang cepat dan pundi-pundi kekayaan bagi pemilik media. Bagi pembaca ini melemahkan penggunaan logika, sehingga sering terjadi miskonsepsi dan berbuntut pada pembentukan pengetahuan sesuai keinginan kelas penguasa.

Upaya *tirto.id* sebagai salah satu contoh kanal pemberitaan daring berbeda, mereka tidak menggunakan cara-cara struktur logika pendek. Mereka masih mementingkan kedalaman informasi, verifikasi, dan kejelasan sumber data. Praktiknya *tirto.id* menggunakan 4 hal metode (Ciptadi & Armando, 2018). Pertama kecepatan, *tirto.id* memaknai kecepatan bukan dengan cepat-cepat menerbitkan dalam beberapa

setelah peristiwa terjadi. Namun menunggu sambil mengumpulkan semua informasi dari sumber primer. Kedua *tirto.id* mementingkan *cover bothside* karena itu merupakan kewajiban jurnalis dalam pemberitaan. Ketiga kedalaman berita *tirto.id*, bentuk ini ditawarkan dengan menolak kebiasaan memproduksi berita cepat dan asal-asalan terbit. Penyajian berita mendalam dan penuh data, jadi berita tidak sepenggal-sepenggal dan butuh banyak artikel berita yang diterbitkan. Dalam satu kali terbit cukup untuk membaca dapat mengetahui peristiwa yang diberitakan. Keempat tidak mementingkan iklan pada website *tirto.id*, karena *tirto.id* tidak memburu pembaca dan jumlah klik untuk mendapatkan iklan dari pihak lain. *Tirto.id* lebih mementingkan substansi berita yang mereka tayangkan, daripada mengais pengunjung dan klik dari penggunanya.

Ada lagi *remotivi.com*, ia berbeda dengan *tirto.id*. *Remotivi.com* adalah sebuah media yang berfokus sebagai mengawasi konten-konten tayangan di televisi. Televisi dapat membentuk perilaku kekerasan. Salah satu penelitian Universitas Washington dalam Haspramudilla menyebutkan bahwa tanpa adanya televisi jumlah pembunuhan hanya akan terjadi setengahnya (Haspramudilla, 2009). Maka dari itu *remotivi.com* didirikan untuk menjadi kontrol bagi tayangan televisi di Indonesia.

Selain *tirto.id* dan *remotivi.com* ada lagi kanal yang bernama *indoprogress.com*. Adapun *indoprogress.com* memiliki klaim bahwa kanal mereka ruang untuk bertukar gagasan dan pengalaman politik praktis dalam bingkai besar gerakan anti-kapitalisme. Berdasarkan klaim tersebut tentu *indoprogress.com* menawarkan wacana-wacana anti-mainstream. Dalam mukadimahnya perjuangan melawan kapitalisme sebagai langkah konkret bagi kelas pekerja membebaskan diri dari penindasan kapitalisme (Indoprogress,

2006). Tujuan *indoprogress.com* mengembalikan fokus perlawanan kelas pekerja melawan kapitalisme. Adanya *website* ini agar kelas pekerja tidak terseret jauh pada arus konflik-konflik yang mereka sebut sebagai konflik etnis, ras, agama, militerisme, nasionalisme sempit, hingga ketidakadilan gender, dan seksual akibat dominasi patriarki di masyarakat (Indoprogress, 2006). Media-media mainstream korporasi seringkali menerbitkan kabar-kabar yang seperti disebutkan oleh *indoprogress.com*, untuk mengaburkan fokus perlawanan kelas pekerja.

Fokus penelitian ini melihat resistensi *indoprogress.com* sebagai resistensi hegemoni wacana kelas penguasa. Agar memberikan sebuah pemahaman mengenai cara media daring melakukan resistensi hegemoni wacana. Perkembangan wacana kekinian dikuasai oleh media-media milik kelas penguasa. Akibatnya persepsi pembaca dikonstruksi untuk membenarkan produksi wacana dari kelas penguasa. Oleh sebab itu penelitian ini berusaha mendeskripsikan mengenai bentuk resistensi *indoprogress.com*. Kemudian memberikan gambaran bentuk resistensi dari *indoprogress.com*.

Jurnalisme memiliki peran penting di negara demokrasi, setidaknya Strömbäck memetakan empat tipologi jurnalisme di negara demokrasi yakni; demokrasi prosedural, demokrasi kompetitif, demokrasi partisipatori, dan demokrasi deliberasi (Strömbäck, 2005). Pada tipe demokrasi prosedural jurnalisme hanya berfungsi *monitoring* prosedur pelaksanaan pemilu serta memberikan laporan penyimpangan penyelenggara pemilu. Tipe demokrasi kompetitif memaksa jurnalisme memaksimalkan dalam menegakkan dan menghidupkan kompetisi politik. Jurnalisme dalam negara demokrasi partisipasi memberikan harapan lebih besar dengan teknis pemberitaan untuk mengoptimalkan

demokrasi. Terakhir deliberasi demokrasi menekankan proses keterbukaan ruang publik, dengan cara menciptakan dialog dan diskusi saat pengambilan keputusan di level apapun (Ambardhi, 2017). Jurnalisme di Indonesia masih mencari bentuknya sehingga belum dapat dimasukkan ke dalam kategorisasi tipologi jurnalisme di negara demokrasi milik Strömbäck.

Pentingnya topik ini diangkat dengan alasan sebuah resistensi media semacam *indoprogress.com* untuk mengimbangkan ekosistem demokrasi. Praktik konglomerasi media dapat mempengaruhi proses demokrasi, khususnya untuk konsolidasi demokrasi. Pasalnya media membentuk atmosfer sosial politik Indonesia, sehingga membentuk konstruksi bernama “Era Media”. Benuknya memiliki peran vital mengenai substansi yang boleh atau tidak didiskusikan oleh masyarakat, kekuatan dalam pemilihan umum, menyebarkan agenda elit politik, menjadikan berita sebagai komoditas, meraup keuntungan melalui berita, paling penting media memiliki kemampuan untuk membeli pengaruh politik (Valerisha, 2016). Maka perlu mengurangi jumlah atau kemampuan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sebab media merupakan salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri. Jika media sudah dibajak atau dikuasai oleh pilar demokrasi lainnya, perlu adanya penyeimbang sebagai alternatif pengetahuan wacana di luar produksi dari media klas penguasa.

## 1.2 Batasan Penelitian

Pembahasan batasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian. Adanya pembatasan penelitian juga dapat menghindari pembahasan yang tidak perlu dan rancu, sehingga pokok masalah dapat dianalisis dan dibahas dengan tuntas. Pembatasan dilakukan dengan membuat ruang lingkup, sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek penelitian.

Ruang lingkup yang membatasi masalah dalam penelitian ini adalah wacana perburuhan yang diangkat di *indoprogress.com* yang bersifat konter-hegemoni, disandingkan dengan wacana perburuhan dari beberapa media situs web arus utama yang bersifat hegemoni. Adapun wacana tersebut dibatasi dari tahun 2015 sampai 2020. Isu-isu yang dianalisis terdiri dari isu *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, buruh perempuan dan politik emak-emak, buruh asing, dan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana *indoprogress.com* berperan sebagai media alternatif untuk melakukan konter terhadap hegemoni wacana kelas penguasa?

## 1.4 Tujuan Penelitian

- a. Menggambarkan hegemoni kelas penguasa melalui media di Indonesia.

- b. Menggambarkan konter hegemoni *indoprogress.com* terhadap wacana kelas penguasa Indonesia.
- c. Mendapatkan penjelasan cara bekerjanya wacana di dalam media informasi yang terus berkembang terutama di era internet.
- d. Memberikan penjelasan bagaimana kelas dominan dapat memenangkan dominasi wacana atas kelompok lainnya.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis penelitian adalah mengembangkan wacana keilmuan Ilmu Pemerintahan dengan memberikan informasi tentang teori hegemoni dan resistensi hegemoni di Indonesia, khususnya resistensi *indoprogress.com* terhadap hegemoni wacana kelas penguasa bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pembanding civitas akademik yang ingin melakukan penelitian terkait hegemoni atau resistensi hegemoni wacana.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang sebuah resistensi media di dunia daring terhadap hegemoni wacana kelas penguasa. Di sisi lain juga memberikan kontribusi terhadap pentingnya keseimbangan ekosistem demokrasi di sebuah negara.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama, artikel jurnal oleh Birowo, M. A. (2004), tentang perlawanan hegemoni media dengan strategi komunikasi berpusat pada masyarakat. Penelitian ini membahas media alternatif pada masyarakat akar rumput berbentuk radio komunitas, sebagai bentuk konter hegemoni dari media massa komersil. Radio komunitas ini merupakan bentuk dari gerakan masyarakat sipil.

Penelitian kedua, artikel jurnal oleh Im, H. B. (1991), tentang hegemoni dan konter hegemoni Gramsci. Penelitian ini membahas seluruh pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni dan konter-hegemoni yang bersumber pada bukunya *The Prison Notebooks*.

Penelitian ketiga, artikel jurnal oleh Pribadi, W. A. (2008), tentang pemikiran Gramsci dalam memahami gerakan globalisasi alternatif. Penelitian ini membahas kontribusi perspektif Gramscian dalam memahami gerakan globalisasi alternatif. Terminologi Gramsci seperti hegemoni, masyarakat sipil, perang posisi, dan krisis organik digunakan untuk menganalisis gerakan globalisasi alternatif. Berdasarkan terminologi tersebut, dapat dipahami bahwa gelombang balik globalisasi sebagai bagian dari masyarakat sipil global yang menggunakan kekuatannya untuk melawan hegemoni.

Penelitian keempat, artikel jurnal Siswati, I. (2017), tentang anatomi teori hegemoni Gramsci. Penelitian ini membahas seluruh pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni dan konter-hegemoni, masyarakat sipil, masyarakat politik, perang posisi, perang gerakan, dan intelektual organik.

Penelitian kelima, skripsi Salikhatin Pawestri (2015), tentang analisis novel Bibir Merah dengan menggunakan teori hegemoni. Penelitian ini menjelaskan bentuk susunan ideologi, corak hegemoni kekuasaan yang berjalan dan unsur-unsur fiksi yang dipakai dalam merefleksikan hegemoni kekuasaan dalam novel Bibir Merah. Terdapat beberapa temuan dalam penelitian ini. Pertama formasi ideologi, seperti vandalisme, sosialisme, kapitalisme, dan otoritarianisme. Kedua, mendeskripsikan corak hegemoni kekuasaan yang berjalan menghasilkan dua ranah yakni masyarakat sipil dan masyarakat politik yang menjalankan hegemoni maupun menjadi objek hegemoni.

Penelitian keenam, artikel jurnal oleh Strömbäck (2005) membahas dampak media dan jurnalisme terhadap demokrasi biasanya mengkritik media dan jurnalisme karena kontennya dan efek negatifnya pada beberapa aspek demokrasi. Pada gilirannya, hal ini menimbulkan pertanyaan untuk mengidentifikasi standar berita yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas jurnalisme berita. Tetapi baik standar berita yang diusulkan maupun kritik yang dilontarkan terhadap mereka tidak menentukan dengan cukup kejelasan model demokrasi untuk digunakan sebagai penyimpangan normatif. Artikel ini berpendapat bahwa pertanyaan tentang standar berita yang tepat tidak dapat ditangani secara terpisah dari pertanyaan tentang model demokrasi normatif yang berbeda. Untuk mengetahui standar pemberitaan yang dapat atau harus dievaluasi kualitas jurnalisme berita, maka dilakukan analisis terhadap empat model demokrasi normatif dan tuntutanannya terhadap warga negara: demokrasi prosedural, demokrasi kompetitif, demokrasi partisipatoris, dan demokrasi musyawarah.

Penelitian ketujuh, skripsi oleh Haspramudilla (2009) membahas pengaruh tayangan reka ulang terhadap persepsi khalayak. Penelitian ini membahas tentang penggunaan teori pelatihan dalam penyiaran berita kejahatan terhadap persepsi masyarakat tentang realitas kasus kejahatan. Studi tersebut juga membandingkan pandangan dari dua jenis penonton, masyarakat umum dan narapidana. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivis. Dari penelitian ini ditemukan bahwa eksposur siaran akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap realitas kriminal. Dari data yang diolah, peneliti juga menemukan bahwa masyarakat umum yang diwawancarai dan narapidana memiliki pandangan yang berbeda tentang fakta kejahatan yang disiarkan. Publik cenderung menganggap konten yang disajikan sama dengan fakta yang sebenarnya, sedangkan penonton narapidana justru sebaliknya.

Kajian kedelapan yang dimuat dalam jurnal Valerisha (2016) mengungkap pengaruh praktik kelompok media terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Artikel ini menjelaskan bagaimana perilaku monopoli di sektor media telah mempengaruhi proses demokrasi di negara tersebut, terutama dampaknya terhadap realisasi “konsolidasi demokrasi”. Media menetapkan apa yang harus didiskusikan, dan apa yang harus dihindari untuk diskusi publik. Media memiliki hak untuk memilih pemimpin nasional, media telah mempublikasikan agenda elit politik untuk menjadikan berita sebagai komoditas dan mendapatkan keuntungan dari tindakan ini, sehingga memungkinkan pemilik media untuk membeli pengaruh politik.

Penelitian kesembilan, artikel jurnal oleh Ciptadi dan Armando (2018) yang mengungkapkan upaya agensi melawan logika jangka pendek jurnalisme online. Artikel

ini membuktikan bahwa berita online mengikuti struktur logis jangka pendek. Logika ini berimplikasi pada praktik pelaporan yang ringkas, berkelanjutan, sensasional, dan hanya relevan untuk sejumlah besar pengeklik dan pemirsa. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa media online tidak mengikuti logika jangka pendek. Salah satunya adalah Tirto.id. Dengan menggunakan teori terstruktur sebagai kerangka ideologis, penelitian ini mempelajari resistensi Tirto.id terhadap struktur logis jangka pendek. Tirto mengusulkan bentuk baru berita online, yang disebutnya berita data / presisi.

Penelitian kesepuluh merupakan artikel jurnal karya Himawan (2011) yang membahas tentang etika jurnalistik online. Kajian ini mengedepankan beberapa poin bahwa konsumen media membutuhkan akurasi dan keseimbangan selain kecepatan. Mereka juga menuntut wartawan untuk melaporkan secara jujur dan adil. Dengan kata sederhana, sekalipun ia bekerja di kelompok media tertentu, atau ia memiliki afiliasi politik tertentu, pelapor harus dapat menjaga objektivitasnya.

## **1.7 Kerangka Teori**

Kerangka teoritik ini akan membahas teori utama yang digunakan dalam riset ini antara lain teori hegemoni dan konter hegemoni, dan Partisipasi Media Baru dalam Politik Demokrasi.

### **1.7.1 Teori Gramsci tentang Hegemoni dan Konter Hegemoni**

Pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni dan konter hegemoni (*counter hegemony*) bersumber dari bukunya yang berjudul *Quaderni del*

Carcere yang ia tulis di dalam penjara, lalu kemudian diterbitkan dalam bahasa Inggris pada 1971 berjudul *Prison Notebooks*. Pemikiran Gramsci terbentuk berdasarkan latar belakang keadaan Italia yang dikuasai rezim fasis Benito Mussolini. Ia melihat bahwa kekalahan kelas pekerja oleh kaum fasis tidak semata-mata karena represi fisik oleh alat kekerasan negara, namun juga oleh cara-cara non-represif yang membentuk kesadaran kelas pekerja lewat ide-ide atau nilai-nilai dari negara.

Untuk dapat memahami pemikiran Gramsci tentang hegemoni dan konter hegemoni, pertama-tama terlebih dahulu akan dijelaskan gambaran masyarakat seperti apa yang menjadi objek kajian Gramsci. Sebagai pemimpin Partai Komunis Italia, Gramsci adalah seorang Marxis. Oleh karenanya, pemikiran Gramsci didasarkan pada tesis Marx bahwa sejarah perkembangan masyarakat merupakan sejarah pertentangan kelas. Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial yang saling bertentangan, antara budak dan majikan, tani hamba dan tuan tanah, hingga borjuis atau kapitalis dan proletar atau buruh, singkatnya antara penindas dan tertindas (Marx & Engels, 1848).

Antara kelas penindas dan kelas tertindas memiliki ketimpangan yang mencolok, yaitu berupa penguasaan sumber daya ekonomi dan kontrol terhadap institusi-institusi politik yaitu negara. Kelas penindas menguasai sumber daya ekonomi maupun institusi politik, menjadikannya sebagai kelas yang berkuasa atau kelas penguasa (*rulling class*). Konsepsi Antonio Gramsci tentang hegemoni diartikan bahwa kelas yang berkuasa dalam suatu

masyarakat mengoperasikan kekuasaan pada kelas-kelas yang dikuasai dapat melalui metode maupun cara persuasif

Gramsci tidak pernah menjabarkan secara detail definisi hegemoni maupun kontra hegemoni. Adapun yang mendefinisikannya kebanyakan adalah para akademisi berdasarkan interpretasi atas teks *Prison Notebooks*. Terry Eagleton menyebutkan bahwa Gramsci menggunakan kata hegemoni untuk mengartikan cara-cara di mana kekuasaan yang memerintah memenangkan persetujuan untuk aturannya dari yang ditundukkannya. (Eagleton, 1991). Menurut Roger, hegemoni adalah bentuk-bentuk dominasi atas mayoritas sendi kehidupan masyarakat, mulai dari politik, sosial, ekonomi, moral, dan intelektual, dengan menampilkan segi-segi konsensual yang bersifat tidak koersif, yaitu dengan relasi konsensual berupa ketertundukan yang didapatkan dengan cara penguasaan ideologis dari kelas penguasa (Roger, 2004).

Tatkala kuasa hegemoni telah diraih, relasi antara kelas penguasa dan kelas yang diperintah berjalan secara kompromistis dan konsensual. Kelas yang dikuasai mengartifimasi secara sadar atas dominasi kelas penguasa. Kelas yang dikuasai telah mengamini ideologi dari penguasa sebagai ideologi mereka sendiri (Cox, 1993).

Gramsci mengatakan, dalam hal mencapai konsensus untuk mencapai hegemoni, kelas yang berkuasa acapkali menjadikan media sebagai alat

penyampaian ideologi. Media adalah “tangan-tangan” milik kelas yang berkuasa untuk memastikan ideologi yang mendominasi yang berujung pada hegemoni terhadap golongan-golongan lainnya di masyarakat (Arief, 2003).

Di satu sisi, hegemoni kelas penguasa terlihat begitu kuat dalam mencengkram kesadaran ideologis masyarakat. Namun ada kondisi demikian tidaklah dapat berlangsung selamanya. Gramsci kemudian menjelaskan akan terjadinya “krisis organik” pada kekuasaan yang dibangun. Krisis organik adalah kondisi di mana kelas penguasa kehilangan legitimasi dari kelas yang dikuasainya. Kedudukannya tidak lagi sebagai “*leader*”, tetapi hanya sebagai “kelas dominan”. Mekanisme koersif menjadi satu-satunya alat kekuasaan yang dimiliki penguasa, yaitu kekuatan militer negara. Rakyat terlepas dari relasi-relasi emosional dan ideologis yang sebelumnya mencengkram relasi hierarkis antara mereka dengan negara. (Pribadi, 2008). Hal ini sebagaimana dinyatakan Gramsci (Gramsci, 1971):

*“If the ruling class has lost its consensus, i.e. is no longer “leading” but only “dominant,” exercising coercive force alone, this means precisely that the great masses have become detached from their traditional ideologies, and no longer believe what they used to believe previously, etc. The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born.”*

Penjelasan Gramsci di atas menunjukkan bahwa kelas tertindas atau kelas yang dikuasai berpeluang untuk melawan dominasi kelas yang berkuasa. Perlawanan kelas tertindas ini tidak bisa dilakukan begitu saja lewat perang

atau revolusi fisik, namun memerlukan strategi yang oleh Gramsci disebut “perang posisi” (*war position*). Adapun perang posisi adalah perang untuk menaklukkan masyarakat sipil (*civil society*) guna mengubah *common sense* masyarakat yang tadinya melindungi hegemoni menjadi melawan hegemoni. (Cox, 1993). Kelas-kelas sosial yang subordinat atau kelas yang dikuasai di dalam masyarakat sipil dapat membangun perlawanan dalam bentuk konter hegemoni (*counter hegemony*) (Siswati, 2017). Masyarakat sipil menjadi wilayah dilakukannya konter hegemoni karena di wilayah masyarakat sipil itulah berlangsungnya hegemoni sendiri. Dalam masyarakat sipil-lah terdapat kaum intelektual, kehidupan privat, dan institusi-institusi sipil yang menjadi kepanjangan tangan dari hegemoni kelas penguasa (Gramsci, 1971).

Terdapat dua fungsi konter hegemoni. Pertama, adalah untuk membongkar ideologi kapitalisme yang ditabur oleh kelas penguasa. Kedua, adalah untuk membangun konstruksi ideologi dan politik alternatif yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mengubah tatanan kapitalisme. (Im, 1991)

Manakala kelas penguasa menggunakan media sebagai upaya hegemoni, maka masyarakat yang tertindas pun dapat menggunakan media alternatif sebagai upaya konter hegemoni. Media alternatif sebagai upaya konter hegemoni ini bermaksud untuk mempengaruhi makna suatu informasi di masyarakat agar dapat menandingi hegemoni dari kelas penguasa (Birowo,

2004). Mengenai peranan media alternatif ini akan dijelaskan dalam sub bab tersendiri.

## **1.8 Partisipasi Media Baru dalam Politik Demokrasi**

### **1.8.1 Media Baru**

Media massa terus mengalami perubahan terus-menerus. Bermula dari bentuk fisik semacam koran hingga kini beralih menjadi media elektronik di dunia digital. Kapanpun dan di manapun dapat mengakses media massa seperti itu. Ada pengaruh teknologi yang mampu menggeser atau mengubah bentuk informasi tersebut. Bentuk perubahan media massa menjadi media elektronik ini dinamakan sebagai media baru. McQuail mendefinisikan media baru adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang berbagi ciri kesamaan, selain baru dimungkinkan dengan digitalisasi dan luasnya ketersediaan untuk penggunaan pribadi alat komunikasi (McQuail, 2009). Fokus perhatian media baru pada aktivitas di internet dengan penggunaan publik, seperti berita daring, iklan, aplikasi penyiaran, forum dan aktivitas diskusi, *World Wide Web* (WWW), pencarian informasi dan potensi pembentukan komunitas tertentu.

Media baru memerlukan perangkat elektronik untuk dapat bisa dijalankan. Awal pertama kali media baru tidak lebih mendahului perangkatnya, yaitu komputer. Sebab aspek fundamental dari media baru berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Agar dapat

menghasilkan suatu proses teks yang dikodifikasikan atau direkam sehingga dapat terdistribusi dengan baik kepada perangkat penerima (McQuail, 2009). Ciri utama media baru tentu memerlukan internet sebagai dimensi ruang pertukaran arus informasi. Postmes menerangkan bahwa komputer memiliki keunikan dan menyampaikan informasi tanpa perlu berdedikasi terhadap siapapun (Postmes, Spears, & Lea, 1998).

McQuail menerangkan bahwa cara penyebaran internet bekerja merupakan gabungan antara radio, film, dan televisi dengan menggunakan tombol push (McQuail, 2009). Media baru menghilangkan batasan antara model pencetakan dan penyiaran dengan memungkinkan banyak pihak untuk berbicara dan menerima pada saat yang sama, menghilangkan batas geografis atau teritorial, menyediakan kontak global dan interkoneksi instan. Oleh karena itu, media baru memiliki peluang, jangkauan audiens, dan komunikasi global yang tidak terbatas (Livingstone, 1999). Sebagai hasil dari proses pembaruan media baru, Lievrouw menunjukkan bahwa media baru telah menjadi arus utama, konvensional dan basi (Lievrouw, 2004). Ini dapat mengubah hubungan antara peran dan peran di media baru itu sendiri.

Secara umum, jika kita mempertimbangkan peran dan hubungan utama dalam organisasi media tradisional, terutama dalam hal pengarang, penerbitan, produksi dan distribusi, dan penerimaan, maka perbedaan antara media baru dan lama dapat dijelaskan secara lebih rinci. Singkatnya, efek utamanya adalah sebagai berikut. Bagi penulis, menulis di Internet, menerbitkan sendiri,

membuat blog, dan perilaku otonom serupa semakin mungkin dianggap sebagai penerbitan. Namun, sejauh ini, status dan rasa hormat penulis bergantung pada kepentingan dan lokasi publikasi serta tingkat perhatian dan penerimaan publik. Menulis surat atau puisi pribadi atau memotret bukanlah penulis yang sebenarnya.

Kondisi untuk kepercayaan publik tidak berubah dengan munculnya teknologi baru, dan kondisi untuk mendapatkan khalayak yang luas dan menyebarkan popularitas mungkin menjadi lebih mudah. Mudah untuk eksis di Internet tanpa kerjasama dengan media tradisional. Akan tetapi, di sisi lain, semakin banyak kesulitan dalam mempertahankan hak cipta dan akibat dari persaingan dalam penyediaan "konten gratis". Bagi penerbit, perannya terus berlanjut tetapi menjadi semakin ambigu karena alasan yang sama yang dialami penulis. Sampai saat ini, publikasi umumnya adalah perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba publik. Media baru membuka bentuk publikasi alternatif dan menciptakan peluang dan tantangan bagi penerbitan tradisional. Penjemputan tradisional, intervensi editorial, dan otorisasi dapat ditemukan di beberapa jenis publikasi online tetapi tidak pada yang lain.

Meskipun peran konsumen adalah seperti ini, ada banyak ruang untuk perubahan, terutama mengarah pada otonomi yang lebih besar dan kesetaraan dalam hubungan pemasok dan pengadaan. Anggota audiens tidak lagi menjadi bagian dari massa tetapi anggota jaringan yang dipilih sendiri atau audiens atau individu tertentu. Selain itu, keseimbangan aktivitas audiens bergeser dari

penerimaan menjadi eksplorasi, konsultasi, dan interaksi yang lebih pribadi. Rice menyajikan paradoks berbagai jenis pilihan yang dihadapi audiens: individu saat ini harus membuat lebih banyak pilihan, harus memiliki pengetahuan sebelumnya, dan harus lebih berupaya untuk mengintegrasikan dan menafsirkan komunikasi (Rice, 1999). Interaktivitas dan pilihan bukanlah kebajikan universal; banyak orang tidak memiliki energi, keinginan, kebutuhan atau pelatihan untuk terlibat dalam proses semacam itu.

Dalam kaitannya dengan hubungan antara peran yang berbeda, kami dapat mengusulkan sesuatu yang lebih fleksibel dan gratis, terutama untuk penulis dan audiens. Rice menemukan bahwa batasan antara penerbit, produsen, distributor, konsumen, dan pengamat konten menjadi semakin kabur (Rice, 1999). Hal ini menimbulkan keraguan atas kelayakan gagasan lembaga sebagai organisasi sosial dengan norma dan praktek yang sama. Jika terjadi kegagalan, kami akan lebih memperhatikan pembuatan cabang, lembaga khusus yang menangani kegiatan media, yang lebih kompleks. Berdasarkan teknologi serta aplikasi dan konten tertentu, misalnya jurnalisme berita, film hiburan, bisnis, olahraga, pornografi, pariwisata, pendidikan, profesi, dll, tanpa identitas kelembagaan bersama.

### **1.8.2 Media Baru dan Demokrasi**

Edmund Burke menyebut media adalah satu dari empat pilar demokrasi (Darmanto, 2015). Demokrasi itu sendiri membutuhkan warga negara yang mengetahui informasi dengan baik sebagai fondasi kesadaran politik dalam

menentukan sikap dan pilihan-pilihan politik, seperti pilihan calon pemimpin dalam pemilihan umum, sikap terhadap suatu undang-undang, dan sebagainya. Media berfungsi menjalankan peranan sebagai penyedia informasi tersebut sehingga sistem demokrasi dapat berlangsung. Media juga merupakan ruang publik, wahana bagi warga negara untuk dapat mengutarakan pendapat, mencapai kesepakatan maupun ketidaksepahaman dengan sesama warga negara (Simamarta, 2014). Peranan media hari ini dapat kita lihat tidak sekadar sebagai pembawa berita saja, namun juga sarana interaksi publik dalam membentuk opini publik yang dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan politik. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang berhasil menemukan media berbasis internet atau media *online* atau media daring (dalam jaringan) sebagai media baru.

Ada keniscayaan bahwa adanya media baru akan memperkuat demokrasi. Hal ini mengacu pada kesamaan karakter antara media baru demokrasi. Dalam sistem demokrasi, terdapat nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia, partisipasi, kebebasan, pengakuan atas perbedaan, dan kesetaraan. Nilai-nilai demokrasi direalisasikan dalam media baru. Terdapat ruang yang bebas yang hampir tak terbatas dalam media baru yang didasari oleh prinsip kebebasan, kesetaraan, dan setiap orang memiliki peranan sebagai pencipta (produser) yang bersifat independen. Hal ini terbukti dengan banyaknya media independen yang dibuat oleh individu maupun kelompok di berbagai *platform* dengan begitu mudah dan murah. Media baru juga

memiliki kemampuan yang partisipatif sebagai kekuatan tersendiri. Partisipasi inilah yang menjadi dasar demokrasi (Simamarta, 2014).

Melalui media baru, demokrasi partisipatif dapat ditegakkan. Van Dijk menerangkan bahwa demokrasi partisipatif adalah demokrasi yang secara substansial berdasarkan pada kinerja warga negara daripada ke lembaga-lembaga negara (Dijk & Hacker, 2000). Struktur komunikasi yang dibentuk media baru menempatkan warga negara sebagai aktor politik, (Simamarta, 2014) tidak lagi sebagai objek politik yang pasif. Hal ini dimungkinkan karena melalui media baru, warga negara dapat membentuk kekuatan politik yang signifikan untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Beberapa protes demonstrasi pada tahun-tahun belakangan ini bisa menjadi contoh bagaimana warga negara mampu menjalin konsolidasi gagasan melalui media baru, seperti aksi tolak omnibus law, aksi penolakan RKUHP, aksi reformasi dikorupsi, penolakan pendirian bandara NYIA, penolakan pendirian pabrik semen di Kendeng, aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa, dsb.

Di Indonesia secara khusus, gerakan reformasi 1998 yang menyapu tatanan otoriter dan militeristik Orde Baru dan melahirkan demokrasi tidak terlepas dari peranan media baru. Masuknya internet pada 1990-an di Indonesia, munculnya warnet-warnet (warung internet), digunakan oleh para aktivis mahasiswa, aktivis NGO (*non government organization*), dan intelektual untuk bertukar informasi untuk membangun blok oposisi Suharto. Mereka membuat forum-forum seperti milis, berkirim informasi lewat surel, membuat artikel di

*news group*, dsb. Hal ini dimungkinkan karena transmisi informasi internet masih sulit dikontrol dan tidak dapat disensor seperti halnya koran dan televisi (Hill & Sen, 2005).

Penggunaan media baru didasarkan pada koneksi internet. Rasanya terlalu optimis jika mengharapkan pemajuan demokrasi dengan bersandar pada media baru, mengingat penetrasi internet di Indonesia yang masih tidak sebesar negara-negara maju. Namun sebuah penelitian dari *We Are Social* dan *Hootsuite* pada 18 Februari 2020 menunjukkan bahwa terdapat 175,4 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2020. Angka ini menunjukkan peningkatan sejak 2019 sebanyak 25 juta atau naik 17 persen. Juga terdapat 160 juta pengguna media sosial di Indonesia per Januari 2020. Angka ini menunjukkan peningkatan sejak 2019 sebanyak 12 juta atau naik 8,1 persen. Ini artinya sekitar 64 persen penduduk Indonesia adalah pengguna internet (Kemp, 2020). Besarnya pengguna internet di Indonesia adalah ceruk basah bagi perkembangan media baru. Itu artinya pula, terdapat peluang besar bagi pemajuan demokrasi.

## **1.9 Definisi konseptual**

### **1.9.1 Hegemoni dan konter hegemoni**

Hegemoni adalah serangkaian penguasaan dari kelas penguasa kepada kelas yang dikuasai, dengan mengedepankan aspek-aspek konsensual

nonkoersif, yaitu dengan hubungan konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penguasaan ideologi.

Konter hegemoni adalah upaya kelas tertindas atau kelas yang dikuasai dalam masyarakat sipil dalam melawan hegemoni kelas penguasa, yang berfungsi membongkar ideologi kelas penguasa dan membangun konstruksi ideologi dan politik alternatif.

a. Media Baru

Media baru adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang berbagi ciri kesamaan, selain baru dimungkinkan dengan digitalisasi dan luasnya ketersediaan untuk penggunaan pribadi alat komunikasi.

b. Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Rakyat memiliki kebebasan dan hak-hak asasi serta hak-hak sebagai warga negara yang dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Rakyat juga merupakan penentu jalannya pemerintahan mulai dari pengisian jabatan sampai berpartisipasi untuk memutuskan sebuah peraturan.

### **1.10 Definisi Operasional**

Untuk menjelaskan konter hegemoni *indoprogress.com* sebagai media baru terhadap wacana kelas penguasa, maka penelitian memakai beberapa indikator sebagai berikut:

**1.10.1 Hegemoni, indikatornya:**

- a. Serangkaian penguasaan dari kelas penguasa kepada kelas yang dikuasai
- b. Mengedepankan aspek-aspek konsensual nonkoersif
- c. Dengan hubungan konsensus
- d. Ketertundukan diperoleh melalui penguasaan ideologi.

**1.10.2 Konter hegemoni, indikatornya:**

- a. Upaya kelas tertindas atau kelas yang dikuasai dalam masyarakat sipil
- b. Melawan hegemoni kelas penguasa
- c. Berfungsi membongkar ideologi kelas penguasa
- d. Berfungsi membangun konstruksi ideologi dan politik alternatif.

**1.10.3 Media Baru, indikatornya:**

- a. Media elektronik di dunia digital
- b. Memproduksi wacana alternatif
- c. Media yang dibuat dengan komunikasi dua arah (terjadi pendiskusian)
- d. Kepemilikan tidak tunggal
- e. Pendanaan dari donasi pembaca

**1.10.4 Demokrasi, indikatornya:**

- a. Rakyat memegang kedaulatan
- b. Rakyat memiliki kebebasan dan hak asasi
- c. Rakyat menentukan dan berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan

- d. Terdapat kebebasan bagi media dalam membentuk opini publik dan hak rakyat dalam berpartisipasi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan negara.

## **1.11 Metode Penelitian**

### **1.11.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana. Studi kualitatif adalah studi yang menghasilkan hasil yang tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat mengungkap kehidupan manusia, sejarah, perilaku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, dan hubungan kekerabatan (Almanshur & Ghony, 2012). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena mencoba menjelaskan perlawanan indoprogress.com terhadap wacana hegemoni kelas penguasa.

Kualitatif memiliki banyak prosedur untuk digunakan dalam penelitian selain metode kuantitatif. Penelitian memiliki asumsi filosofis, strategi penelitian, metode pengumpulan, analisis dan interpretasi berbagai data. Prosedur kualitatif didasarkan pada teks dan data gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data, dan pendanaan berasal dari strategi penelitian yang berbeda (Craswell, 2010). Subjek penelitian dalam makalah ini adalah teks atau artikel di dalam *website* indoprogress.com yang

bertumpu pada hegemoni kelas penguasa. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif dapat digunakan dalam penelitian.

### **1.11.2 Sumber Data**

Ada dua macam data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Data primer (dalam bentuk teks-teks yang digunakan sebagai sampel penelitian); 2. Data sekunder (dalam bentuk penelitian kepustakaan). Data primer dalam penelitian ini adalah data-data berupa teks di *website* indoprogress.com berjudul bertema perburuhan. Sumber data sekunder didapatkan dari referensi seperti buku, jurnal, atau data elektronik di *website*.

### **1.11.3 Teknik Penentuan Sasaran Penelitian**

Teknik penentuan sasaran penelitian merupakan cara peneliti dalam memilih dan memilah data sesuai dengan pertanyaan penelitian. Teknik penentuan sasaran penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini memiliki sasaran secara jelas dan sesuai dengan topik penelitian. Pemilihan sasaran berdasarkan subjektivitas peneliti dengan karakteristik yang telah ditentukan. Sasaran penelitian ini adalah artikel di dalam *website* indoprogress.com dengan isu perburuhan. Artinya karakteristik artikel disesuaikan dengan isu perburuhan. Lalu kemudian

menautkan dengan artikel dengan isu yang sama dari hegemoni penguasa, sehingga penelitian ini mampu memunculkan sisi konter hegemoni untuk penguasa. Nantinya pembahasan isu perburuhan pada *indoprogress.com* akan dihadapkan dengan pemberitaan media-media arus utama seperti *tribunnews.com*, *kompas.com*, *rmol.id*, *jpnn.com*, *mediaindonesia.com*, *merdeka.com*, *republika.co.id*, *kumparan.com*, *okezone.com*, dan *liputan6.com*. Agar dapat memunculkan maksud konter hegemoni dari *indoprogress.com*.

#### 1.11.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan tergantung dari sumber data primer. Karena sumber primer dari penelitian ini merupakan artikel, pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik baca (Ratna, 2010). Membaca dalam artian ini dengan cara memberikan perhatian fokus pada objek penelitian. Proses membaca dengan memberikan perhatian penuh terhadap objek data disebut sebagai proses menyimak (Ratna, 2010). Membaca, menyimak, dan mencatat sehingga teknik ini disebut sebagai baca, simak, dan catat (Ratna, 2010).

Table 1.1 Isu Perburuhan

Isu Perburuhan		
No	Hegemoni Wacana Kelas	Konter Hegemoni Wacana
Isu	Penguasa	Indoprogress.com

1. Undang-Undang Cipta Kerja
- a. Penjelasan Lengkap Jokowi Manfaat UU Cipta Kerja untuk Masyarakat (<https://www.merdeka.com/uang/penjelasan-lengkap-jokowi-manfaat-uu-cipta-kerja-untuk-masyarakat.html>)
  - b. UU Cipta Kerja Solusi Permasalahan Produktivitas Pekerja (<https://mediaindonesia.com/ekonomi/354213/uu-cipta-kerja-solusi-permasalahan-produktivitas-pekerja>)
  - c. UU Omnibus Law Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju 2045 (<https://republika.co.id/>)
- a. Sebelum UU Cipta Kerja Disahkan, Situasi Perburuhan di Indonesia Sudah Buruk; Bagian I (<https://indoprogress.com/2020/11/sebelum-uu-cipta-kerja-disahkan-situasi-perburuhan-di-indonesia-sudah-buruk-bagian-i/>)
  - b. Bagi Aliansi Politik-Bisnis, Buruh adalah Penghambat Investasi (<https://indoprogress.com/2020/02/korupsi-bukan-penghambat-investasi-tapi-buruh/>)

berita/q60zt2383/uu-  
emomnibus-lawem-bisa-  
dorong-indonesia-jadi-  
negara-maju-2045)

2. Buruh  
Perempuan

a. Partai Emak-emak  
Pendukung Prabowo-  
Sandi Dideklarasikan  
(<https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/08/23/partai-emak-emak-pendukung-prabowo-sandi-dideklarasikan>)

b. Adu Strategi Politik  
Emak-Emak dan Ibu  
Bangsa di Pilpres 2019  
(<https://kumparan.com/kumparannews/adu-strategi-politik-emak-emak-dan-ibu-bangsa-di>)

a. Di Mana dan Ke Manakah  
Suara Buruh Perempuan?  
(<https://indoprogress.com/2018/10/di-mana-dan-ke-manakah-suara-buruh-perempuan/>)

[pilpres-2019-](#)

[1536993209874776561\)](#)

- c. Ketika emak-emak meleak politik

(<https://www.merdeka.com/khas/ketika-emak-emak-melek-politik.html>)

- a. KSPSI Nilai Perpres 20/2018 Perketat Masuknya Tenaga Kerja Asing

(<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/30/15322401/kspsi-nilai-perpres-202018-perketat-masuknya-tenaga-kerja-asing?page=all>)

- a. Tiga Argumen Penyikapan Gerakan Buruh terhadap Perpres Tenaga Kerja Asing

(<https://indoprogress.com/2018/04/tiga-argumen-penyikapan-gerakan-buruh-terhadap-perpres-tenaga-kerja-asing/>)

3. Buruh Asing

b. Perpres Tenaga Kerja

Asing Bukan

Mempermudah Masuk

ke RI

([https://economy.okezone.com/read/2018/04/21/320/1889705/perpres-](https://economy.okezone.com/read/2018/04/21/320/1889705/perpres-tenaga-kerja-asing-bukan-mempermudah-masuk-ke-ri)

[tenaga-kerja-asing-](https://economy.okezone.com/read/2018/04/21/320/1889705/perpres-tenaga-kerja-asing-bukan-mempermudah-masuk-ke-ri)

[bukan-mempermudah-](https://economy.okezone.com/read/2018/04/21/320/1889705/perpres-tenaga-kerja-asing-bukan-mempermudah-masuk-ke-ri)

[masuk-ke-ri\)](https://economy.okezone.com/read/2018/04/21/320/1889705/perpres-tenaga-kerja-asing-bukan-mempermudah-masuk-ke-ri)

[masuk-ke-ri\)](https://economy.okezone.com/read/2018/04/21/320/1889705/perpres-tenaga-kerja-asing-bukan-mempermudah-masuk-ke-ri)

[masuk-ke-ri\)](https://economy.okezone.com/read/2018/04/21/320/1889705/perpres-tenaga-kerja-asing-bukan-mempermudah-masuk-ke-ri)

c. Moeldoko Sebut Perpres

Tenaga Kerja Asing

Lindungi Pekerja Lokal

([https://nasional.tempo.co/read/1084732/moeld](https://nasional.tempo.co/read/1084732/moeldoko-sebut-perpres-tenaga-kerja-asing-lindungi-pekerja-lokal)

[oko-sebut-perpres-](https://nasional.tempo.co/read/1084732/moeldoko-sebut-perpres-tenaga-kerja-asing-lindungi-pekerja-lokal)

[tenaga-kerja-asing-](https://nasional.tempo.co/read/1084732/moeldoko-sebut-perpres-tenaga-kerja-asing-lindungi-pekerja-lokal)

[lindungi-pekerja-lokal\)](https://nasional.tempo.co/read/1084732/moeldoko-sebut-perpres-tenaga-kerja-asing-lindungi-pekerja-lokal)

[lindungi-pekerja-lokal\)](https://nasional.tempo.co/read/1084732/moeldoko-sebut-perpres-tenaga-kerja-asing-lindungi-pekerja-lokal)

4. PP 78/2015

a. Ini Tujuan Pemerintah

Terbitkan PP

a. Ketika Kepolisian

Melanggar Undang-

- Pengupahan  
[\(https://www.liputan6.com/bisnis/read/2351038/ini-tujuan-pemerintah-terbitkan-pp-pengupahan\)](https://www.liputan6.com/bisnis/read/2351038/ini-tujuan-pemerintah-terbitkan-pp-pengupahan)
- b. Dicurigai, Gerakan Mogok Nasional Buruh Dipolitisasi  
[\(https://www.rmol.id/read/2015/11/21/225427/Dicurigai,-Gerakan-Mogok-Nasional-Buruh-Dipolitisasi\)](https://www.rmol.id/read/2015/11/21/225427/Dicurigai,-Gerakan-Mogok-Nasional-Buruh-Dipolitisasi)
- c. PP 78 Tahun 2015 Untungkan Pekerja dan Pengusaha  
[\(https://www.jpnn.com/news/pp-78-tahun-2015-Undang:KasusRepresiTerhadapDemonstrasiDamaiBuruh\)](https://www.jpnn.com/news/pp-78-tahun-2015-Undang:KasusRepresiTerhadapDemonstrasiDamaiBuruh)
- Undang: Kasus Represi terhadap Demonstrasi Damai Buruh  
[\(https://indoprogress.com/2015/11/ketika-kepolisian-melanggar-undang-undang-kasus-represi-terhadap-demonstrasi-damai-buruh/\)](https://indoprogress.com/2015/11/ketika-kepolisian-melanggar-undang-undang-kasus-represi-terhadap-demonstrasi-damai-buruh/)
- b. Tantangan Kesatuan Identitas Buruh dan Politik Kelas Buruh  
[\(https://indoprogress.com/2015/09/tantangan-kesatuan-identitas-buruh-dan-politik-kelas-buruh/\)](https://indoprogress.com/2015/09/tantangan-kesatuan-identitas-buruh-dan-politik-kelas-buruh/)

untungan-pekerja-dan-  
pengusaha]

#### **1.11.5 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Terdapat tiga cara dalam model analisis data ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta kesimpulan (Miles & Huberman, 2007). Pada model ini dapat disebut analisis data interaktif karena proses pengumpulan data berlangsung kemudian bergerak di antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi data, setelah pengumpulan data menggunakan waktu selama proses penelitian.

#### **1.11. 6 Reduksi Data**

Reduksi data adalah merampingkan data dengan memilih data penting, menyederhanakan, dan mengabstraksikannya (Sangidu, 2004). Pada tahap ini melakukan pengelompokan data untuk mencari penyelesaian masalah, penggunaan teori, dan penggunaan metode ketika menganalisis resistensi indoprogress.com terhadap hegemoni wacana kelas penguasa. Data yang telah direduksi tersebut merupakan gambaran tentang hasil pengamatan, mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang telah diperoleh bila diperlukan (Arikunto, 2006).

### **1.11.7 Penyajian Data**

Penyajian data adalah menyajikan data secara analitik dan sintetis dalam bentuk uraian data-data yang terangkat disertai bukti-bukti tekstual yang ada (Sangidu, 2004). Teknik penyajian data menggunakan teknik analitis, dengan cara membaca keseluruhan artikel yang telah dipilih kemudian melakukan analisis terhadap wacana dalam artikel pilihan sebelumnya. Agar dapat secara mudah dan cepat pemilihan artikel dilakukan sebelum melakukan penelitian.

### **1.11.8 Penarikan kesimpulan atau Verifikasi**

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan dengan didukung bukti kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sebelumnya.